

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL INDONESIA	i
HALAMAN SAMPUL INGGRIS	ii
HALAMAN SAMPUL INDONESIA	iii
HALAMAN SAMPUL INGGRIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Tinjauan Pustaka	10
1.5. Metode Penelitian dan Sumber	20
1.6. Sistematika Penulisan	22
BAB II PENERAPAN KEBIJAKAN DAN DEPOLITISASI KAMPUS UNIVERSITAS GADJAH MADA DI BAWAH NORMALISASI KEHIDUPAN KAMPUS DAN BADAN KOORDINASI KEMAHASISWAAN (1970-1978) ..	24
2.1. Latar Belakang Lahirnya Kebijakan NKK/BKK	24
2.2. Masuknya NKK/BKK ke Universitas Gadjah Mada	37

2.3. Dampak NKK/BKK terhadap Kehidupan Mahasiswa UGM	49
BAB III STRATEGI, ADAPTASI, DAN PERTAHANAN MAHASISWA UGM DI BAWAH NORMALISASI KEHIDUPAN KAMPUS DAN BADAN KOORDINASI KEMAHASISWAAN (1978-1985)	57
3.1 Dinamika Gelanggang Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa	57
3.2. Prof. Dr. Teuku Jacob, MS, DS. dan Kebijakan Stabilitas UGM	66
3.3. Majalah Gelora Mahasiswa Sebagai Simbol Kritis Mahasiswa	70
3.4. Senat Mahasiswa	75
3.5. Aktivitas Lembaga Muslim Kampus Sebagai Gerakan Moral	81
BAB IV TRANSFORMASI DAN STRATEGI PERLAWANAN MAHASISWA UGM DAN RUNTUHNYA NORMALISASI KEHIDUPAN KAMPUS DAN BADAN KOORDINASI KEMAHASISWAAN (1986-1990)	88
4.1 Kebijakan NKK/BKK di Era Nugroho Notosusanto	88
4.2. Rektor Transformasi Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri dan Iklim Keterbukaan Ruang Demokrasi Mahasiswa	90
4.3. Lembaga Pers Mahasiswa Sebagai Media Perlawanan	93
4.4. Lembaga Muslim Kampus dan Eskalasi Gerakan Mahasiswa	96
4.5. Gelanggang Mahasiswa Sebagai Basis Konsolidasi Organisasi	98
4.6. Senat Mahasiswa dalam Upaya Pengembalian Kedaulatan Mahasiswa	100
4.7. Prof. Dr. Fuad Hassan dan Akhir NKK/BKK	102
BAB V KESIMPULAN	107
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR NAMA NARASUMBER	119
LAMPIRAN	120
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	126